

## **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMDes) di Kampung Wiwonum Distrik Woropko Kabupaten Boven Digoel**

**Fitriani<sup>1</sup>, Mesak Kotouki<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Musamus

<sup>2</sup>Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Pemerintah Daerah Kabupaten Boven  
Digoel, Provinsi Papua Selatan

Email : [fitriani310878@gmail.com](mailto:fitriani310878@gmail.com)

### **Abstrak**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dengan adanya peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuannya masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Dengan keberhasilan BUMDes di Kampung Wiwonum dalam mengelola perekonomian kampung dan memberdayakan masyarakat kampung yang memiliki potensi alam perkebunan hingga hasilnya di ekspor keluar daerah dan luar negeri, maka dapat memberikan dampak baik kepada kampung lain agar membentuk BUMDes masing-masing kampungnya agar dapat mengelola perekonomiannya. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMDes) di Kampung Wiwonum Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel, dan Untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMDes) di Kampung Wiwonum Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mendapatkan data dan informasi dari observasi, data sekunder dan wawancara informan sejumlah 10 orang. Hasil penelitian ini adalah Masyarakat Kanggewot dibekali usaha tentang berinovasi hasil tani mulai dari cara menjual sembako menjual durian membuat kripik pisang dan singkong dengan membuat beberapa olahan dari hasil tani maka masyarakat dalam segi ekonomi akan terbantu karena mempunyai nilai jual yang tinggi dipasaran dan cakupan penjualan lebih jauh. BUMKAM Wiwonum memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Kampung Kanggewot yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya dengan sistem bagi hasil 50%-50% tujuannya agar masyarakat yang mulanya tidak mempunyai usaha maka akan mempunyai usaha dengan diberikannya modal ini masyarakat akan terberdaya secara ekonomi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat adalah dari eksternal dan internal.

**Kata Kunci:** pemberdayaan, masyarakat, BUMdes

### **Abstract**

*The formation of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is intended to encourage or accommodate all activities to increase community income, both those that develop according to local customs and culture, as well as economic activities that are handed over to be managed by the community through programs or projects of the central government and regional governments. Therefore, by providing opportunities for the community to develop and be empowered according to their abilities, the community can improve the economic level of their families. With the success of BUMDes in Wiwonum Village in managing the village economy and empowering village communities who have*

*natural plantation potential so that the results are exported to the region and abroad, it can have a good impact on other villages to form BUMDes in their respective villages so they can manage their economy. This research aims to find out how Community Empowerment works through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wiwonum Village, Waropko District, Boven Digoel Regency, and to describe what factors influence Community Empowerment through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wiwonum Village, Waropko District. Boven Digoel Regency. The method used is descriptive qualitative by obtaining data and information from observation, secondary data and interviews with 10 informants. The results of this research are that the Kanggewot Community is equipped with efforts to innovate agricultural products, starting from selling basic necessities, selling durian, making banana and cassava chips, by making several preparations from agricultural products, the community will be helped economically because it has a high selling value on the market and further sales coverage. BUMKAM Wiwonum provides capital loans to the people of Kanggewot Village who want to start a business or develop their business with a profit sharing system of 50%-50%, with the aim being that people who initially do not have a business will have a business. By providing this capital, the community will be empowered economically, and the following factors Factors that influence community empowerment are external and internal.*

**Keywords:** *empowerment, community, BUMdes*

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (Anita Fauziah, 2009).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya memiliki dua makna pokok, yakni:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat (*to give ability or enable*) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.
2. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proposional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan (*to give authority*) dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan (Aprilia, 2014).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Begitu pula yang dimaksud dalam pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu upaya yang dilakukan oleh pengelola BUMDes dan pemerintah desa dengan mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha sehingga masyarakat mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada didesa tersebut.

BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (Ahmad Dian, 2017). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes di bangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid, penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tat aturan yang mengikat seluruh

anggota (Nur Fatin, 2018).

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan disini juga melibatkan partisipasi masyarakat, hal ini karena masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan difasilitasi oleh pemerintah sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan hingga masyarakatnya bisa mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi lokal yang ada dimasyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di Kampung Wimonon Distrik Warapko, didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu dengan adanya peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuannya masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Dengan keberhasilan BUMDes di Kampung Wiwonum dalam mengelola perekonomian kampung dan memberdayakan masyarakat kampung yang memiliki potensi alam perkebunan hingga hasilnya di ekspor keluar daerah dan luar negeri, maka dapat memberikan dampak baik kepada kampung lain agar membentuk BUMDes masing-masing kampungnya agar dapat mengelola perekonomiannya.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dikombinasikan dengan Pedoman Wawancara, yaitu dengan menetapkan objek kajiannya berupa pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung di kampung Wimonon Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel. Sumber primer yang digali berasal dari hasil wawancara, sedangkan sumber sekunder yang digunakan berasal dari gambaran umum Pemberdayaan Masyarakat, BUMDes/BUMKam, perundang-undangan, hasil riset dan data lain berupa literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yang diperoleh melalui berbagai laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan lain-lain. Dalam penelitian ini informan yang digunakan sejumlah 10 orang yang terdiri dari sekretaris kampung, kepala direksi Bumkam, tokoh masyarakat, anggota Bumkam dan dari Dinas PMK. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif, terdapat 3 hal pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman dalam Ifasaksily, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Jenis pemberdayaan ekonomi masyarakat Kampung kanggewot yang telah dilakukan oleh BUMKam Wiwonum adalah sebagai berikut:**

### **1. Bantuan Modal**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dalam pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMKam Wiwonum adalah dengan memberikan modal berupa uang maupun barang sesuai kebutuhan kepada masyarakat yang mengajukan kepada BUMKam. Dengan adanya bantuan modal masyarakat dapat membuka usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki seperti, produksi durian, pembuatan kripik singkong/pisang dan penjualan sembako, dan lain sebagainya.

### **2. Pemasaran**

Hal yang selanjutnya dilakukan oleh BUMKam Wiwonum dalam pemberdayaan masyarakat adalah menyediakan *outlet* untuk menampung produk-produk yang diproduksi oleh masyarakat. BUMKam Wiwonum juga melakukan beberapa metode pemasaran seperti melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat kampung dan di Boven Digoel dan Merauke, memperkenalkan produk dengan cara studi banding ke BUMKam Wiwonum maupun ke BUMKam lain tetapi untuk BUMKam yang lain belum ada sampai saat ini, apabila di kemudian hari ada kesempatan baru akan studi banding antar BUMKam.

### **3. Kekuatan Kelembagaan**

Dalam melakukan pemberdayaan perlu adanya lembaga yang mumpuni untuk menjalankan sesuai target yang telah direncanakan. Tanpa sebuah lembaga yang kuat maka akan sulit untuk menguatkan masyarakat yang diberdayakan. Salah satu langkah yang ditempuh oleh BUMKam Wiwonum dalam menguatkan lembaganya adalah memberikan pelatihan dan studi banding kepada para karyawan terkait dengan

pengelolaan serta pengawasan yang ada untuk memantau jalannya sebuah pemberdayaan ekonomi.

#### 4. **Kemitraan Usaha**

BUMKam Wiwonum menjalin kemitraan dengan beberapa BUMKam lain serta organisasi guna menggali potensi yang dimiliki Kampung Kanggewot. Dari proses pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMKam Wiwonum berdirilah Beberapa unit usaha antara lain:

- a. Unit simpan pinjam, di dalam pasal 12 Bab V dimana unit usaha dalam BUMKam dapat memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Kampung. Teknis pengelolaan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMKam Wiwonum terinci sesuai dengan ketentuan yang ada di Anggaran Dasar (AD) serta Anggaran Rumah tangga (ART) yakni untuk jasa pinjaman sebesar 1,5% yang diangsur selama 10 bulan, untuk jasa simpanan 0,5%. Selain itu BUMKam Wiwonum menerapkan sistem agunan berupa sertifikat tanah adat atau BPKB juga ada pinjaman khusus untuk UMKM sebesar 1.000.000 tanpa agunan.
- b. Unit pembudidayaan durian yang berdiri sejak awal adanya BUMKam ini adalah salah satu cara BUMKam memberikan bantuan modal berupa barang. Dengan sistem bagi hasil 70:30, 70 untuk pihak petani durian dan 30 pihak BUMKam.
- c. Toko, Sesuai dengan pasal 10 Bab V terkait dengan klasifikasi jenis usaha BUMKam yang berbunyi bahwa Kampung perlu adanya sebuah pasar untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat. Maka BUMKam Wiwonum membentuk sebuah toko untuk menampung semua produk yang dihasilkan masyarakat maupun menyediakan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
- d. Sarana Produksi Pertanian ( Saproktan ), Mayoritas penduduk Kampung Kanggewot adalah petani oleh karena itu selain adanya sebuah toko untuk pemasaran produk BUMKam serta ada unit simpan pinjam sebagai sarana kredit juga terdapat saproktan yaitu sarana produksi pertanian guna menyiapkan kebutuhan pertanian yang disebut dengan saproktan. BUMKam menjalankan bisnis barang-barang tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat maka BUMKam Wiwonum mendirikan sebuah toko saproktan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pertanian.
- e. Kampung tani, Sesuai dengan Undang-undang No 3 tentang tujuan pendirian BUMKam adalah meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kampung, maka BUMKam Wiwonum bekerjasama dengan pemerintah Kampung serta beberapa BUMKam lain mendirikan sebuah Gedung penampungan bahan produksi hasil tani di Tanah Merah.

Namun tidak semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMKam Wiwonum berhasil. Ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja. Seperti Unit usaha batago, kerajinan tangan atau noken tradisional dan juga pembudidayaan karet, BUMKam Wiwonum yang dijalankan oleh bapak Yohanes Yanem merupakan salah satu unit usaha yang berkembang, produksi hasil tani berdiri pada tahun 2020. Pada saat itu produksi durian BUMKam Wiwonum menjadi primadona masyarakat Kanggewot karena selain harganya yang sangat terjangkau juga memiliki kualitas yang bagus, dengan seiring berjalannya waktu, permintaan produksi durian ini tambah meningkat setiap bulannya.

Selanjutnya unit usaha karet adalah salah satu unit usaha yang telah berdiri pada saat itu namun belum memiliki pasar yang luas, lalu BUMKam Wiwonum memberikan suntikan modal berupa uang dan bantuan peralatan pembudidayaan karet, namun beberapa kendala terjadi seperti kurang adanya unit pemasaran yang jelas, maka pihak petani karet memutuskan kerja sama dengan BUMKam dan mengembalikan modal yang telah diberikan.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak berhasilnya usaha-usaha tersebut karena tidak adanya pelatihan usaha untuk para pelaku usaha dibawah naungan BUMKam Wiwonum sehingga wawasan terhadap dunia usaha kurang menyeluruh dan aktual. Hal ini memicu kegagalan para pelaku usaha yang ada karena melalui pelatihan ini diharapkan dapat mencermati kiat-kiat tertentu dalam dunia usaha sehingga meminimalisir adanya kegagalan dalam mengembangkan usaha.

Bantuan yang diberikan oleh BUMKam tidak memberikan dampak positif jangka panjang namun hanya bertahan beberapa tahun saja. Banyak usaha yang bangkrut, berhenti memproduksi ini dikarenakan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh BUMKam, tidak adanya pelatihan serta pengawasan yang sangat minim terhadap masyarakat. Studi banding yang tujuannya adalah menambah wawasan para pegawai hanya dijadikan ajang jalan-jalan karena mereka menganggap ini adalah satu-satunya apresiasi yang diterima sebagai pegawai BUMKam karena gaji yang diterima

tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, serta masih adanya kredit macet sehingga membuat pihak BUMKam harus melakukan tindakan menagih dan masyarakatpun tidak diberikan pinjaman apabila masuk dalam kategori tersebut.

### **Pemberdayaan Masyarakat Oleh BUMKAM Wiwonum Distrik Waropko Kab. Boven Digoel**

Konsep *empowerment* merupakan sebuah proses pengembangan kemandirian yang menunjukkan bahwa komunitas atau lembaga sedapat mungkin berusaha mengandalakan sumber daya nya sendiri daripada bergantung pada komunitas lain atau otoritas pusat (Jim Ite, 2008). Dari definisi konsep *empowering* diatas terdapat upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, diantaranya (Fitria, 2020) ada beberapa komponen yang peneliti kaji:

1. **Peningkatan Kapasitas (*Educating & Encouraging*)**  
Melalui konsep ini bermaksud membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya sebuah program pembangunan, hal ini termasuk dalam aspek *educating*. Selain itu masyarakat juga didorong untuk tergerak dalam berpartisipasi di setiap proses pemberdayaan (*encouraging*);
2. **Peningkatan Aksesibilitas (*Opportunities & Devoluting*)**  
Konsep ini bermaksud mengembangkan peluang atau kesempatan (*opportunities*) agar masyarakat bisa berpartisipasi antar sumberdaya manusia (SDM) atau anggota lainnya di dalam lembaga khususnya lembaga BUMKam. Serta sebagai hubungan kekuasaan atau kewenangan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengambil keputusan (*devoluting*);
3. **Pemanfaatan Potensi Lokal (*Empowering & Enabling*)**  
Konsep ini bermaksud untuk meningkatkan potensi dan kapabilitas masyarakat untuk dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat (*empowering*). Selain itu melalui pemanfaatan potensi lokal masyarakat Kampung juga mampu untuk menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya (*enabling*).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa :

- a. **Peningkatan kapasitas**  
tahap pengkapasitasan masyarakat di proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMKam di Kampung Kanggewot memiliki tahap yang panjang, mulai dari masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi di Kampung, tidak adanya pergerakan, kemudian tumbuh adanya rasa yakin dan optimis dalam mencari, merekrut, melatih sumber daya manusianya untuk dapat mengelola potensi dan usaha yang ada di Kampung Kanggewot dikatakan berhasil meskipun dibalik itu terdapat suatu hambatan. Namun setidaknya program – program, kegiatan, aktifitas yang ada di BUMKam Wiwonum tersebut dapat dikelola dengan baik sampai sekarang.
- b. **Peningkatan aksesibilitas**  
Pada proses ini adalah tahap tingkat aksesibilitas masyarakat yang dilihat dari proses partisipasi SDM yang tergabung dalam lembaga BUMKam dan akses pembiayaan awal masyarakat dalam memulai usaha di BUMKam Wiwonum. Adanya proses menyatukan individu-individu dalam BUMKam Wiwonum merupakan pengintegrasian melalui melibatkan masyarakat yang sudah masuk dalam kepengurusan. Dari struktur yang dibuat tentunya memiliki aktifitas yang saling berkesinambungan sehingga adanya proses akses integrasi di dalamnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan program kerja masing-masing.
- c. **Peningkatan potensi lokal**  
penggalan potensi di wilayah Kampung Kanggewot dinilai efektif dalam memanfaatkan peluang sumber daya alamnya. Karena tidak semua masyarakat akan mau dan peduli dengan kegiatan tersebut. Bekal kerjasama, gotong royong, kesukarelaan dan keyakinan dari masyarakat Kampung Kanggewot dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga menjadi suatu potensi yang dapat mengunggulkannya di masa mendatang tentunya membuahkan hasil. Hasil yang dicapai hingga saat ini adalah kampung yang berkembang dan maju. Kampung Kanggewot memiliki banyak potensi apalagi wisatanya yaitu edukasi bercocok tanam, edukasi beternak, edukasi pemanfaatan bahan limbah. Dan lain - lain.

### **Faktor pendukung dan penghambat yang dialami BUMKam dalam menjalankan kegiatan usaha di Kampung Kanggewot Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel**

Dalam proses pemberdayaan melalui BUMKam di Kampung Kanggewot, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung pemberdayaan, merupakan faktor yang mendukung, mendorong, membantu, maupun mempercepat keberhasilan pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:
  1. Faktor pendukung yang berasal dari dalam (internal)  
Faktor pendukung yang berasal dari dalam yaitu adanya niat dan semangat individu dalam berusaha. Faktor ini turut menentukan keberhasilan penacapaian hasil. Niat yang kuat akan membuat individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pemberdayaan dari awal hingga akhir.
  2. Faktor pendorong dari luar (eksternal)  
Faktor pendukung yang berasal dari luar antara lain:
    - a) Potensi sumber daya alam yang tersedia  
Sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki Kampung Kanggewot sebagai Kampung produktif dengan hasil tani. Potensi alam yang lumayan banyak menjadikan Kampung Kamggewot mudah menentukan jenis pemberdayaan apa yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
    - b) Dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kampung  
Tidak dipungkiri bahwa dukungan merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat membantu kelancaran pemberdayaan. Adanya dukungan memudahkan dalam menjalin kerjasama dan menekan timbulnya konflik yang mungkin disebabkan akibat perbedaan pendapat.
- b. Faktor penghambat pemberdayaan  
Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Faktor penghambat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:
  1. Faktor penghambat dari dalam (internal)  
Faktor penghambat yang berasal dari dalam yaitu minimnya sumber daya manusia ( SDM ) yang mengerti manajemen BUMKam. Pengelola BUMKam saat ini hanya berkisar 3-5 orang dan banyak yang merangkap jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMKam. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik.
  2. Faktor penghambat dari luar (eksternal)  
Faktor penghambat yang berasal dari luar antara lain minimnya anggaran dana yang disediakan anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Kampung untuk program pemberdayaan BUMKam masih dirasakan kurang karena BUMKam sendiri memiliki anggaran yang sedikit dan harus dibagi lagi mengakibatkan unit usaha tidak bisa mengembangkan usahanya secara pesat. Belum lagi masalah minimnya sarana prasarana penunjang pada BUMKam Wiwonum seperti jalan, Gedung tempat penjualan hasil produksi dan juga kurangnya sarana transportasi opsional tdk memadai. Dengan semua kekurangan ini membuat semangat juang masyarakat berkurang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Kampung di BUMKAM Wiwonum Kanggewot telah berjalan dengan baik, namun di disatu tahun terakhirnya ini mengalami kendala dalam anggaran sehingga berdampak kepada produksi.

### 1. Pemberdayaan Masyarakat Yang Diterapkan Oleh BUMKAM Wiwonum Kanggewot Boven Digoel

Masyarakat Kanggewot dibekali usaha tentang berinovasi hasil tani mulai dari cara menjual sembako menjual durian membuat kripik pisang dan singkong dengan membuat beberapa olahan dari hasil tani maka masyarakat dalam segi ekonomi akan terbantu karena mempunyai nilai jual yang tinggi dipasaran dan cakupan penjualan lebih jauh. BUMKAM Wiwonum memberikan pinjaman modal kepada masyarakat Kampung Kanggewot yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya dengan sistem bagi hasil 50%-50% tujuannya agar

masyarakat yang mulanya tidak mempunyai usaha maka akan mempunyai usaha dengan diberikannya modal ini masyarakat akan terberdaya secara ekonomi.

a. Peningkatan kapasitas

tahap pengkapasitasan masyarakat di proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMKam di Kampung Kanggewot memiliki tahap yang panjang, mulai dari masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi di Kampung, tidak adanya pergerakan, kemudian tumbuh adanya rasa yakin dan optimis dalam mencari, merekrut, melatih sumber daya manusianya untuk dapat mengelola potensi dan usaha yang ada di Kampung Kanggewot dikatakan berhasil.

b. Peningkatan aksesibilitas

Adanya proses menyatukan individu-individu dalam BUMKam Wiwonum merupakan pengintegrasian melalui perlibatan masyarakat yang sudah masuk dalam kepengurusan. Dari struktur yang dibuat tentunya memiliki aktifitas yang saling berkesinambungan sehingga adanya proses akses integrasi di dalamnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan program kerja masing-masing.

c. Peningkatan potensi lokal

penggalan potensi di wilayah Kampung Kanggewot dinilai efektif dalam memanfaatkan peluang sumber daya alamnya. Bekal kerjasama, gotong royong, kesukarelaan dan keyakinan dari masyarakat Kampung Kanggewot dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga menjadi suatu potensi yang dapat menguntungkannya. Hasil yang dicapai hingga saat ini adalah kampung yang berkembang dan maju.

## **2. Faktor pendorong dan penghambat yang dialami BUMKam dalam menjalankan kegiatan usaha di Kampung Kanggewot Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel**

Proses pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan oleh BUMKam Wiwonum adalah dengan pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha dan kekuatan kelembagaan. Namun ada beberapa unit usaha yang hanya bertahan beberapa tahun saja karena tidak adanya pendampingan.

a. Faktor Pendorong

Faktor pendorong terbagi menjadi 2 yaitu faktor pendorong dari dalam (internal) dan faktor pendorong dari luar (eksternal). Faktor pendorong yang berasal dari dalam (internal) yaitu niat dan semangat dari individu dalam berusaha. Niat dan semangat itulah yang dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan. Sedangkan faktor pendorong dari luar (eksternal) yaitu potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah Kampung Kanggewot yang dapat dijadikan sebagai kampung percontohan dan adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah Kampung dalam setiap pengadaan program-program pemberdayaan yang ada.

b. Faktor Penghambat

Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor penghambat yang berasal dari dalam (internal) yaitu minimnya sumber daya manusia yang mengetahui pemahaman mengenai manajemen BUMKam sehingga pengelola banyak yang merangkap jabatan. Kemudian, faktor penghambat yang berasal dari luar (eksternal) yaitu minimnya anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Kampung yang diakibatkan oleh pembagian ke dalam unit-unit usaha BUMKam yang ada di Kampung Wiwonum. Anggaran dana yang sedikit dan sarana prasarana yang minim membuat perkembangan pemberdayaan akan sulit untuk berkembang maju. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMKam Wiwonum diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Wiwonum untuk selanjutnya, dibutuhkan pendampingan, pelatihan serta pengawasan yang cukup pada setiap usaha dibawah naungan BUMKam sehingga dapat mengontrol jalannya usaha serta memberikan pelatihan ataupun solusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Dian. (2017). Badan Usaha Milik Desa – Ciri ciri, Tujuan, Landasan Hukum, Jenis Usaha, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/bumn/badan-usaha-milik-desa>, di akses pada tanggal 20 Januari 2017.
- Anita Fauziah. (2009). Pemberdayaan Masyarakat pendekatan RRA dan PRA. Malang: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang, h.17
- Aprilia Theresia, et.al. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung:Alfabeta,cetakan kesatu h.124
- Fitria. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adl Islamic Economic, I(1), 13-28.

Ife, jim dan Frank Tesoriero.(2008).Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 721 hal.

Nur Fatin. (2018). Pengertian BUMDes Serta Syarat Pembentukannya, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-bumdes-serta-syarat-terbentuknya.html>, 28 Juli 2018.